



REVISI PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH KELAS II

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **CIPTO HOSARI P. NABABAN, SH.,MH.**
Nip : **19800328 200312 1 001**
Jabatan : **Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **H. MOCHAMAD HATTA, SH.,MH**
NIP : **NIP. 19590511 198404 1 004**
Jabatan : **Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya**

Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama pada tahun 2019 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, 2 September 2019.

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

H. MOCHAMAD HATTA, SH.,MH
NIP. 19590511 198404 1 004

CIPTO HOSARI P. NABABAN, SH.,MH
NIP. 198003282003121001.

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
UNIT KERJA : PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH KELAS II

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100
		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100
		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	87
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	87
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	80
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	80
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	85
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	80
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	80
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	15
		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100
		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	90
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100
		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	10
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	80
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak Lanjuti (Dieksekusi)	10

KEGIATAN	ANGGARAN
1. Program dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas teknis lainnya Mahkamah Agung	Rp. 3.769.656.000,- (Tiga Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Lima puluh Enam Ribu Rupiah)
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Rp. 26.000.000 (Dua Puluh Enam Juta)
3. Program peningktan Manajemen Peradilan Umum	130.120.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah)

Ditetapkan di : PalangkaRaya

Pada Tanggal : 2 September 2019

Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya,

Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh

H. MOCHAMAD HATTA, SH.,MH
NIP. 19590511 198404 1 004

CIPTO HOSARI P. NABABAN, SH.,MH
NIP. 19800328 200312 1 001.